



Special Issue :

Webinar Nasional

**HUMANIS 2025**

Website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Jl. Raya Puspipetek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang

Selatan, Banten 15310,

Email : [humanismanajemen@gmail.com](mailto:humanismanajemen@gmail.com)

## POTENSI QRIS DALAM AKSELERASI TRANSFORMASI INDONESIA SEBAGAI HUB FINTECH DIGITAL ASIA PASIFIK: ANALISIS MULTI-LEVEL DAN IMPLIKASI STRATEGIS

Anjani Putri Afrianti <sup>1)</sup>; Mudji Prasetyo <sup>2)</sup> dan Moh. Fauzi

Universitas Pamulang, [anjaniiffi@gmail.com](mailto:anjaniiffi@gmail.com) <sup>1)</sup>; [mudji.prasetyo@outlook.com](mailto:mudji.prasetyo@outlook.com) <sup>2)</sup>);  
[mohfauzireal@gmail.com](mailto:mohfauzireal@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to analyze the multi-faceted potential of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)—encompassing its domestic impact on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), its role in regional financial integration, and its contribution to digital sovereignty—in positioning Indonesia as a significant digital fintech hub in the Asia Pacific region. Employing a mixed-methods approach that includes quantitative analysis of transaction data (Afrianti & Prasetyo, 2025 ), a systematic literature review (Afrianti & Prasetyo, 2025 ), and comparative analysis, this study reveals that QRIS adoption by MSMEs substantially enhances operational efficiency and expands financial inclusion (Afrianti & Prasetyo, 2025 ). Furthermore, the cross-border expansion of QRIS is shown to strengthen ASEAN regional financial integration and promote the use of local currencies. QRIS also emerges as a crucial instrument in asserting Indonesia's digital sovereignty by reducing dependence on global payment networks. Nevertheless, significant challenges such as cybersecurity, the need for cross-border regulatory harmonization, and compliance with Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) standards in the context of international transactions need to be comprehensively addressed. The main conclusion emphasizes that the full realization of QRIS's strategic potential requires sustained efforts in risk mitigation and strengthening collaborative frameworks to support Indonesia's ambitions in the global fintech ecosystem.*

**Keywords:** QRIS, Fintech Hub, Asia Pacific, Mixed Methods, MSMEs, Operational Efficiency, Financial Inclusion, Regional Financial Integration, Digital Sovereignty, Cross-Border Payment Connectivity, Cybersecurity, Regulatory Harmonization, Local Currency Settlement (LCS).

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara multi-dimensi—mencakup dampak domestik pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peran dalam integrasi keuangan regional, serta kontribusi terhadap kedaulatan digital—dalam memposisikan Indonesia sebagai hub fintech digital yang signifikan di kawasan Asia Pasifik. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) yang meliputi analisis kuantitatif data transaksi (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025 ), tinjauan literatur sistematis (Afrianti & Prasetyo, 2025 ), dan analisis komparatif, penelitian ini mengungkapkan bahwa adopsi QRIS oleh UMKM secara substansial meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas inklusi keuangan (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025 ).



Lebih lanjut, ekspansi QRIS lintas negara terbukti memperkuat integrasi keuangan regional ASEAN dan mendorong penggunaan mata uang lokal. QRIS juga muncul sebagai instrumen penting dalam menegakkan kedaulatan digital Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran global. Meskipun demikian, tantangan signifikan seperti keamanan siber, kebutuhan harmonisasi regulasi lintas batas, dan kepatuhan terhadap standar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dalam konteks transaksi internasional perlu diatasi secara komprehensif. Kesimpulan utama menekankan bahwa realisasi penuh potensi strategis QRIS memerlukan upaya berkelanjutan dalam mitigasi risiko dan penguatan kerangka kerja kolaboratif untuk mendukung ambisi Indonesia dalam ekosistem fintech global.

**Kata Kunci:** QRIS, Hub Fintech, Asia Pasifik, *Mixed Methods*, UMKM, Efisiensi Operasional, Inklusi Keuangan, Integrasi Keuangan Regional, Kedaulatan Digital, Konektivitas Pembayaran Lintas Batas, Keamanan Siber, Harmonisasi Regulasi, *Local Currency Settlement (LCS)*.

## PENDAHULUAN

Pergeseran global menuju ekonomi digital telah mengakselerasi adopsi sistem pembayaran digital, sebuah tren yang semakin dipercepat oleh berbagai faktor, termasuk pandemi COVID-19 yang mendorong transaksi nontunai (World Bank, 2022). Dalam konteks ini, Indonesia, dengan posisi strategisnya di ASEAN dan ambisi ekonomi digital yang besar, menghadapi tantangan fragmentasi sistem pembayaran domestik (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025) dan ketergantungan pada skema kartu internasional seperti Visa dan Mastercard, serta sistem pesan keuangan global seperti SWIFT. Ketergantungan ini tidak hanya berimplikasi pada biaya transaksi yang lebih tinggi bagi pelaku ekonomi, khususnya UMKM, tetapi juga memunculkan potensi kerentanan terhadap kebijakan eksternal atau sanksi ekonomi (Carliner, 2024; Pohle & Thiel, 2020). Menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada tahun 2019 (Bank Indonesia, 2019) sebagai standar nasional untuk menyatukan berbagai platform pembayaran digital dan mendorong efisiensi.

Meskipun QRIS telah menunjukkan keberhasilan signifikan di tingkat domestik, potensinya untuk mengangkat Indonesia menjadi hub fintech regional memerlukan analisis yang lebih mendalam. Hal ini melibatkan pemahaman perannya yang melampaui sekadar fasilitas pembayaran, mencakup kontribusinya terhadap arsitektur keuangan regional, kedaulatan digital nasional, dan daya saingnya terhadap sistem pembayaran nasional lainnya. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: Sejauh mana QRIS, melalui konsolidasi domestik dan ekspansi regionalnya, dapat secara strategis memposisikan Indonesia sebagai hub fintech digital terkemuka di Asia Pasifik, dan apa saja faktor penentu keberhasilan serta implikasi sistemik dari transformasi ini?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dampak adopsi QRIS terhadap efisiensi operasional dan inklusi keuangan UMKM domestik; (2) mengevaluasi peran QRIS lintas batas dalam mendorong konektivitas pembayaran regional ASEAN dan mempromosikan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (*Local Currency Settlement - LCS*); (3) mengkaji implikasi QRIS terhadap kedaulatan digital dan finansial Indonesia; (4) melakukan analisis komparatif QRIS dengan sistem pembayaran nasional terkemuka lainnya (misalnya, UPI India, Pix Brasil); dan (5) mengidentifikasi tantangan strategis utama (keamanan siber, harmonisasi regulasi, APU-PPT) serta mengusulkan rekomendasi kebijakan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis multi-level (domestik, regional, geopolitik) mengenai potensi transformatif sistem pembayaran nasional, melampaui studi adopsi tipikal. Penelitian ini menawarkan kerangka kerja strategis untuk memahami bagaimana infrastruktur keuangan digital dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi nasional dan regional serta penegakan kedaulatan. Dengan mensintesis berbagai titik data—transaksi, dokumen kebijakan, fitur sistem komparatif, dan model adopsi—penelitian ini menyajikan pandangan holistik. Peluncuran QRIS dapat dilihat bukan hanya sebagai peningkatan teknologi, tetapi sebagai langkah strategis menuju bentuk "dekolonisasi finansial" (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025). Pada tingkat mikro, UMKM diuntungkan oleh pengurangan biaya transaksi yang sebelumnya dibebankan oleh skema asing (Bimantara & Nugraha, 2025; UGM News, 2025), memberdayakan mereka secara ekonomi. Pada tingkat makro, adopsi QRIS yang luas mengurangi aliran keluar biaya ke entitas asing, sementara inisiatif seperti QRIS lintas batas dan Konektivitas Pembayaran Regional (RPC) ASEAN mempromosikan penggunaan mata uang lokal (ASEAN, 2023a; AMRO,



2025), mengurangi ketergantungan pada Dolar AS untuk perdagangan regional. Hal ini sejalan dengan tren de-dolarisasi yang lebih luas (Kotecha, 2025; Ainvest, 2025) dan meningkatkan otonomi kebijakan moneter, menjadikan QRIS sebagai instrumen untuk menegaskan kemandirian ekonomi. Sistematika penulisan dimulai dengan pendahuluan, diikuti oleh kajian literatur, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan.

## KAJIAN LITERATUR

Konsep hub fintech digital merujuk pada suatu yurisdiksi yang unggul dalam inovasi teknologi finansial, menarik investasi dan talenta, didukung oleh regulasi yang kondusif, serta memiliki infrastruktur digital yang kuat. Perkembangan sistem pembayaran nasional secara global menunjukkan peran sentral bank sentral dalam modernisasi, dengan contoh seperti Unified Payment Interface (UPI) di India dan Pix di Brasil yang menjadi tolok ukur adopsi cepat dan inovasi (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025; Pohle & Thiel, 2020). Bank Indonesia secara proaktif mendorong modernisasi ini melalui QRIS (Bank Indonesia).

QRIS, sebagai standar pembayaran QR nasional, bertujuan menyatukan ekosistem pembayaran digital di Indonesia, menawarkan universalitas melalui satu kode QR untuk semua aplikasi pembayaran, serta mendukung berbagai mode transaksi seperti Merchant Presented Mode (MPM) dan Consumer Presented Mode (CPM) (Bank Indonesia, 2019). Studi awal menunjukkan dampak positif QRIS terhadap UMKM (misalnya, Sari & Adinugraha, 2021; Nada et al., 2021), meskipun tantangan adopsi juga teridentifikasi.

Di tingkat regional, inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC) ASEAN, yang diluncurkan pada akhir 2022 dan kini mencakup delapan negara anggota (AMRO, 2025; Xinhua, 2025), bertujuan menciptakan sistem pembayaran regional yang mulus, mempromosikan LCS untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar dan guncangan eksternal, serta menurunkan biaya transaksi (ASEAN, 2023a). QRIS Lintas Batas memainkan peran kunci dalam kerangka RPC ini, memungkinkan transaksi dengan negara mitra seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura (Bank Indonesia), dengan rencana ekspansi ke Jepang dan Tiongkok (Bank Indonesia). Penggunaan LCS menjadi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada Dolar AS dan memitigasi risiko eksternal (ASEAN, 2023a; AMRO, 2025).

Kedaulatan digital dalam konteks sistem pembayaran berarti kontrol atas infrastruktur, data, dan pengurangan ketergantungan pada sistem asing (Pohle & Thiel, 2020; Finextra, 2024). UPI India, misalnya, dipandang sebagai instrumen kedaulatan digital yang melindungi dari sanksi asing (Pohle & Thiel, 2020). QRIS, dengan mengurangi ketergantungan pada jaringan global dan menjaga data transaksi dalam kendali nasional/regional, berkontribusi pada kedaulatan finansial dan sejalan dengan konsep "currency statecraft" (Cohen, sebagaimana dikutip dalam Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025), di mana sistem pembayaran digunakan sebagai instrumen pengaruh ekonomi non-politik.

Teori penerimaan teknologi seperti *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh Davis (1986) dengan konstruk persepsi manfaat (*Perceived Usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*Perceived Ease of Use*), serta Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) oleh Venkatesh et al. (2003) dengan konstruk ekspektasi kinerja (*Performance Expectancy*), ekspektasi usaha (*Effort Expectancy*), pengaruh sosial (*Social Influence*), dan kondisi fasilitasi (*Facilitating Conditions*), sering digunakan untuk menganalisis adopsi teknologi pembayaran. Beberapa studi telah menerapkan model ini pada QRIS di Indonesia (misalnya, Mahyuni & Setiawan, 2021; Usaha Journal, 2024; JISEBI, 2024), umumnya menemukan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan menjadi pendorong utama adopsi oleh UMKM.

Keberhasilan sistem pembayaran baru seperti QRIS tidak hanya bergantung pada inisiatif dari atas (bank sentral) dan penerimaan dari bawah (UMKM), tetapi juga pada lapisan "meso" yang krusial, yaitu ekosistem Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), fintech, dan kerangka regulasi pendukung seperti regulatory sandbox. Bank sentral meluncurkan sistem (Bank Indonesia), dan UMKM mengadopsinya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan (Mahyuni & Setiawan, 2021; Usaha Journal, 2024). Namun, implementasi aktual, pengembangan fitur, onboarding merchant, dan penanganan sengketa seringkali ditangani oleh berbagai PJP dan fintech. Efektivitas ekosistem meso ini—bagaimana PJP mengintegrasikan QRIS, merespons kebutuhan

merchant, dan menawarkan layanan kompetitif—sangat menentukan keberlanjutan adopsi dan inovasi. Kerangka regulasi yang mengatur lisensi, sandbox, dan perlindungan konsumen (Bank Indonesia) membentuk lingkungan operasi bagi lapisan meso ini. Dengan demikian, keberhasilan QRIS sebagai pendorong hub fintech sangat bergantung pada kesehatan dan dinamisme lapisan perantara ini.

Lebih jauh, dorongan untuk standar regional seperti QRIS dalam RPC ASEAN dapat dilihat sebagai narasi tandingan terhadap dominasi standar global yang dipimpin Barat (seperti SWIFT atau jaringan kartu), mencerminkan keinginan untuk otonomi regional yang lebih besar dan dunia keuangan multipolar (Keohane & Nye, 2011 ; Oatley, 2019). Sistem pembayaran global saat ini didominasi oleh beberapa pemain dan standar , yang dapat digunakan untuk pengaruh geopolitik (Carliner, 2024). Sebagai respons, negara dan kawasan mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan ini (ECB, 2023 ; Ainvest, 2025). RPC ASEAN, dengan QRIS sebagai komponennya, mempromosikan mata uang lokal dan menghubungkan sistem nasional (ASEAN, 2023a ; AMRO, 2025) , sebuah upaya sadar untuk membangun arsitektur keuangan regional yang kurang bergantung pada sistem eksternal. Ini mencerminkan upaya serupa di tempat lain, menjadikan pengembangan dan promosi interoperabilitas lintas batas QRIS bukan hanya tindakan ekonomi tetapi juga geopolitik.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode campuran (mixed methods), yang mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang komprehensif: data kuantitatif dapat mengungkap apa yang terjadi (misalnya, tingkat adopsi, volume transaksi), sementara data kualitatif (dari literatur, analisis komparatif) dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa, serta mengeksplorasi implikasi strategis yang lebih dalam. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi:

### 1. Data Kuantitatif:

- Data sekunder berupa data transaksi QRIS agregat dari Bank Indonesia periode 2019-2025 (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025) , mencakup jumlah merchant, pengguna, volume, dan nilai transaksi.
- Data primer (sebagaimana disebutkan dalam naskah awal Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025) berasal dari survei terhadap 110 UMKM peserta BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Perlu dicatat bahwa pemilihan sampel dari acara pameran UMKM seperti ini berpotensi mengenalkan bias "pelopor digital" (digital frontrunner bias). UMKM yang berpartisipasi dalam pameran cenderung lebih melek digital dan proaktif dibandingkan rata-rata UMKM. Oleh karena itu, temuan positif mengenai peningkatan efisiensi dari sampel ini mungkin lebih tinggi daripada yang akan ditemukan pada sampel nasional yang lebih representatif. Keterbatasan ini akan diakui dalam pembahasan hasil.

*Table 1. Hasil Survei UMKM Peserta BRI EXPO(RT) 2025*

Peserta UMKM	Total
Home Decor & Craft	15
Food & Beverage	25
Accessories & Beauty	10
Fashion & Wastra	25
Healthcare & Wellness	35

Sumber : BRI UMKM Expo

### 2. Data Kualitatif:

- Tinjauan Literatur Sistematis terhadap 15 artikel terpilih dari Google Scholar dan Garuda menggunakan kerangka PRISMA dengan kata kunci "QRIS" dan "sistem



pembayaran digital" (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025). Proses PRISMA melibatkan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi artikel.

- Analisis Dokumen terhadap dokumen kebijakan, laporan dari Bank Indonesia (misalnya, Bank Indonesia) , komunike ASEAN (misalnya, ASEAN, 2023a) , laporan Bank for International Settlements (BIS) (misalnya, BIS/CPMI) , laporan Bank Dunia (misalnya, World Bank, 2014 , 2022) , analisis industri, dan makalah akademis terkait.
- Data Analisis Komparatif mengenai fitur, biaya, statistik adopsi, dan kerangka regulasi QRIS, UPI (India), dan Pix (Brasil) (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025) , bersumber dari publikasi resmi, studi akademis, dan laporan industri terkemuka.

Teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Analisis Kuantitatif: Statistik deskriptif (frekuensi, rata-rata, persentase) untuk data transaksi dan hasil survei.
2. Analisis Kualitatif: Analisis tematik untuk tinjauan literatur dan analisis dokumen guna mengidentifikasi tema, pola, dan konsep kunci. Analisis konten untuk studi komparatif dengan fokus pada parameter seperti biaya, keamanan, skalabilitas, interoperabilitas, tata kelola, dan pengalaman pengguna (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025).

Kerangka analisis komparatif QRIS dengan UPI dan Pix akan menggunakan parameter berikut: arsitektur dan tata kelola, biaya dan model pendapatan, tingkat adopsi dan kasus penggunaan, interoperabilitas dan jangkauan, keamanan dan manajemen risiko, serta dampak inovasi dan ekosistem.

Kekuatan metodologi ini terletak pada triangulasi data dari berbagai sumber (statistik resmi, survei, literatur, dokumen kebijakan). Pendekatan ini memungkinkan validasi silang temuan dan menghasilkan argumen keseluruhan yang lebih kuat. Data kuantitatif menunjukkan tren dan besaran, sementara data kualitatif memberikan konteks, penjelasan, dan mengeksplorasi implikasi yang lebih dalam. Jika temuan dari sumber yang berbeda konvergen, kesimpulan yang ditarik menjadi lebih valid dan reliabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Adopsi dan Dampak QRIS pada Transformasi UMKM Domestik

Adopsi QRIS oleh UMKM di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Data Bank Indonesia mengindikasikan pertumbuhan berkelanjutan dalam jumlah merchant dan pengguna QRIS (UGM News, 2025 ; Bank Indonesia ). Hingga Oktober 2024, tercatat 34,7 juta merchant telah menggunakan QRIS (UGM News, 2025 ). Survei terhadap UMKM peserta BRI UMKM EXPO(RT) 2025 mengungkapkan bahwa 89% melaporkan peningkatan efisiensi operasional setelah mengadopsi QRIS, dengan rata-rata waktu transaksi berkurang hingga 70 detik per transaksi (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025).

Secara kualitatif, adopsi ini didorong oleh persepsi manfaat, seperti peningkatan efisiensi transaksi, keamanan yang lebih baik, dan pengurangan kontak fisik, serta persepsi kemudahan penggunaan yang secara tidak langsung memengaruhi niat penggunaan melalui peningkatan persepsi manfaat (Mahyuni & Setiawan, 2021 ; Usaha Journal, 2024 ; AJIM, 2025 ; JISEBI, 2024). Salah satu manfaat paling signifikan bagi UMKM adalah pengurangan biaya transaksi dibandingkan dengan metode pembayaran kartu tradisional. QRIS menawarkan biaya yang jauh lebih rendah, bahkan berpotensi nol untuk usaha mikro (UGM News, 2025), dan menghilangkan biaya sewa perangkat Electronic Data Capture (EDC) (Bimantara & Nugraha, 2025 ; UGM News, 2025). Perbandingan biaya disajikan pada Tabel 2.

*Tabel 2. Perbandingan Biaya Transaksi bagi UMKM: QRIS vs. Pembayaran Kartu Tradisional*

Fitur Pembayaran	QRIS	Kartu Debit (Visa/Mastercard)	Kartu Kredit (Visa/Mastercard)
Biaya Transaksi (MDR)	0.3% - 0.7% (Mikro: bisa 0%)	0.5% - 1.5%	1.5% - 3.5%
Biaya Sewa Alat (EDC)	Tidak Ada	Rp 50.000 - Rp 200.000/bulan	Rp 50.000 - Rp 200.000/bulan
Biaya Pendaftaran	Tidak Ada	Bervariasi	Bervariasi



Biaya Lintas Batas	Sesuai ketentuan QRIS Lintas Batas (Bank Indonesia )	Tambahan 1% - 2%	Tambahan 1% - 2%
Waktu Penyelesaian	Hari yang sama / 1-2 hari kerja	1-3 hari kerja	1-3 hari kerja

Sumber: Diolah dari UGM News (<https://feb.ugm.ac.id/en/news/13230-qris-strengthens-indonesias-digital-sovereignty-without-hindering-global-trade>). Dan Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/en/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx>)

Pengurangan biaya dan waktu transaksi ini tidak hanya berarti penghematan finansial bagi UMKM, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pengalaman pelanggan dan potensi peningkatan volume penjualan karena proses pembayaran yang lebih cepat. Transaksi yang lebih cepat mengurangi antrean dan waktu tunggu, yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemampuan melayani lebih banyak pelanggan dalam waktu yang sama, terutama pada jam sibuk, berpotensi meningkatkan volume penjualan. Kombinasi ini, bersama dengan biaya transaksi yang lebih rendah, secara keseluruhan meningkatkan profitabilitas dan daya saing UMKM. Lebih lanjut, QRIS berfungsi sebagai pintu masuk bagi UMKM ke dalam ekosistem digital (Bank Indonesia ), mendukung inklusi keuangan yang lebih luas sejalan dengan temuan Bank Dunia mengenai peran pembayaran digital dalam mendorong inklusi keuangan (World Bank, 2014 , 2022).

## QRIS dalam Arsitektur Konektivitas Pembayaran Regional ASEAN

Inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC) ASEAN, yang diluncurkan pada akhir 2022 dan melibatkan delapan negara anggota ASEAN per tahun 2025 (AMRO, 2025 ; Xinhua, 2025), bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran regional yang lancar, mempromosikan LCS, dan mengurangi risiko eksternal (ASEAN, 2023a). Standarisasi pembayaran QR menjadi fokus utama RPC (AMRO, 2025).

QRIS Lintas Batas merupakan implementasi konkret dari partisipasi Indonesia dalam RPC. Sistem ini memungkinkan pengguna aplikasi pembayaran Indonesia untuk melakukan transaksi di negara mitra dengan memindai kode QR lokal (misalnya, DuitNow QR Malaysia, Thai QR Payment, NETS QR Singapura), dengan transaksi diselesaikan dalam mata uang lokal (Bank Indonesia). Saat ini, kerja sama telah terjalin dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, dengan rencana ekspansi ke Jepang dan Tiongkok yang ditargetkan mulai 17 Agustus 2025 (Bank Indonesia), serta diskusi yang sedang berlangsung dengan India, Korea Selatan, dan Arab Saudi (Bank Indonesia). Data awal menunjukkan pertumbuhan volume transaksi lintas batas QRIS sebesar 214% secara tahunan (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025) , meskipun angka ini perlu diverifikasi dengan data terbaru pasca-ekspansi. Integrasi QRIS dalam jaringan ASEAN diproyeksikan berpotensi meningkatkan PDB perdagangan regional sebesar US\$5,8 miliar pada tahun 2027 melalui reduksi biaya transaksi (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025). Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda G20 di bawah kepemimpinan Indonesia yang menekankan pentingnya peningkatan efisiensi pembayaran lintas batas (FSB, 2023 ; BIS/CPMI, 2023).

Ekspansi QRIS Lintas Batas ini menciptakan sebuah jalur "diplomasi pembayaran" bagi Indonesia. Setiap kesepakatan bilateral yang berhasil dicapai dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain (Bank Indonesia) tidak hanya memerlukan kolaborasi teknis dan penyelarasan kerangka regulasi, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral. Keberhasilan implementasi menunjukkan kapabilitas teknologi Indonesia dan komitmennya terhadap kerja sama regional, yang pada gilirannya meningkatkan pengaruh Indonesia dalam pembentukan standar keuangan regional (ASEAN). Ini merupakan bentuk soft power yang dicapai melalui kepemimpinan teknologi dan kerja sama, yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memajukan kepentingan strategis regional lainnya, seperti fasilitasi perdagangan dan promosi pariwisata.

## Implikasi QRIS terhadap Kedaulatan Digital dan Dinamika Geopolitik Keuangan

Pengembangan QRIS memiliki implikasi signifikan terhadap kedaulatan digital dan finansial Indonesia (UGM News, 2025). Dengan menyediakan alternatif pembayaran domestik yang efisien, QRIS mengurangi ketergantungan pada jaringan kartu internasional seperti Visa dan Mastercard, yang menurut beberapa laporan menguasai porsi besar transaksi global (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025) , serta sistem pesan seperti SWIFT. Pengurangan ketergantungan ini juga berarti berkurangnya potensi pihak asing untuk mengakses data transaksi (intelijen pasar)

dan mengancam dominasi mata uang tertentu (UGM News, 2025). Kontrol nasional atas infrastruktur pembayaran merupakan inti dari kedaulatan digital (Pohle & Thiel, 2020 ; Finextra, 2024), memungkinkan negara untuk melindungi sistemnya dari sanksi asing atau tekanan eksternal, sebagaimana dicontohkan oleh UPI India (Pohle & Thiel, 2020). Selain itu, QRIS mendukung kedaulatan data dengan menjaga data transaksi tetap berada dalam kendali nasional atau regional.

Dalam konteks ASEAN, QRIS dan RPC memfasilitasi penggunaan LCS dalam perdagangan intra-regional (ASEAN, 2023a ; AMRO, 2025 ; Xinhua, 2025). Hal ini sejalan dengan tren de-dolarisasi yang lebih luas di Asia (Kotecha, 2025 ; Ainvest, 2025), yang didorong oleh ketegangan geopolitik dan keinginan untuk kedaulatan ekonomi yang lebih besar (ECB, 2023). Penggunaan mata uang lokal mengurangi paparan terhadap volatilitas Dolar AS dan pengaruh kebijakan moneter AS. Pembekuan cadangan devisa Rusia pada tahun 2022 menjadi katalisator bagi banyak negara untuk mengevaluasi kembali ketergantungan mereka pada sistem keuangan yang didominasi Dolar AS (Ainvest, 2025 ; ECB, 2023).

Secara geopolitik, QRIS dan RPC dapat dipandang sebagai upaya membangun alternatif regional terhadap sistem global (Carliner, 2024), yang berpotensi menggeser sebagian kekuatan finansial. Ini sejalan dengan konsep "*currency statecraft*" (Cohen, sebagaimana dikutip dalam Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025), di mana sistem pembayaran digunakan sebagai instrumen pengaruh ekonomi non-politik. Dorongan untuk QRIS dan konektivitas pembayaran regional bukan hanya tentang efisiensi ekonomi tetapi juga merupakan lindung nilai strategis terhadap potensi fragmentasi geopolitik dan "*weaponization of finance*" (Carliner, 2024). Sistem keuangan global dapat dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik dan digunakan sebagai alat kebijakan, seperti sanksi. Dengan mengembangkan sistem pembayaran nasional dan regional yang independen, Indonesia dan ASEAN mengurangi kerentanan ini (Pohle & Thiel, 2020 ; ASEAN, 2023a), sebuah langkah proaktif untuk memastikan ketahanan ekonomi di tengah lanskap global yang semakin tidak pasti.

### **Analisis Komparatif QRIS dengan Sistem Pembayaran Global (UPI, Pix)**

Dibandingkan dengan sistem pembayaran nasional terkemuka lainnya seperti UPI India dan Pix Brasil, QRIS menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan strategis. Ketiganya dipimpin atau didukung kuat oleh bank sentral, berfokus pada biaya rendah, interoperabilitas, dan inklusi keuangan (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025). UPI India, yang dikelola oleh *National Payments Corporation of India* (NPCI), sangat sukses dalam transaksi P2P dan P2M, didorong oleh pendekatan API terbuka yang memicu inovasi besar dari aplikasi pihak ketiga, dan kini juga berekspansi secara internasional (Pohle & Thiel, 2020). Pix Brasil, yang diluncurkan oleh Bank Sentral Brasil, mencapai adopsi yang sangat cepat berkat fitur pembayaran instan 24/7, biaya rendah, dan partisipasi wajib bagi bank-bank besar, yang berdampak signifikan pada inklusi keuangan dan persaingan di sektor perbankan.

QRIS, yang dipimpin oleh Bank Indonesia, memiliki keunggulan dalam standarisasi nasional yang menyatukan berbagai PJP dan fokus kuat pada pemberdayaan UMKM. Penghargaan Qorus 2023 yang mengakui QRIS atas efisiensi operasionalnya di Asia Pasifik, bahkan dibandingkan UPI dan Pix (Afrianti, Prasetyo & Fauzi, 2025), perlu dilihat dalam konteks aspek spesifik yang dinilai, mengingat skala dan dampak global UPI dan Pix yang sangat besar.

Salah satu diferensiator utama dan keunggulan strategis QRIS adalah penekanannya yang kuat dan sejak awal pada interoperabilitas lintas batas melalui RPC ASEAN. Sementara UPI dan Pix awalnya sangat berfokus pada pasar domestik sebelum melirik ekspansi internasional, QRIS sejak dini telah dirancang dengan visi konektivitas regional (Bank Indonesia ; AMRO, 2025). Hal ini memposisikan QRIS tidak hanya sebagai solusi pembayaran domestik tetapi juga sebagai landasan blok pembayaran regional. Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan sebagai penggerak awal dalam integrasi pembayaran regional ini untuk menjadikan QRIS sebagai standar de facto atau simpul kunci dalam jaringan pembayaran Pan-Asia, dengan fokus pada pengaruh regional strategis.

### **Tantangan Strategis Implementasi dan Ekspansi QRIS**

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi dan ekspansi QRIS menghadapi beberapa tantangan strategis:

1. **Keamanan Siber:** Kekhawatiran UMKM terhadap kerentanan sistem (23% menurut Afrianti & Prasetyo, 2025) perlu ditangani. Risiko penipuan dan pelanggaran data dalam sistem pembayaran digital adalah nyata (Jain et al., 2021 ; Thunes, 2025) , memerlukan protokol keamanan yang kuat, enkripsi, dan otentikasi multi-faktor (Payneteas, 2025).
2. **Harmonisasi Regulasi Lintas Batas:** Perbedaan kerangka kerja KYC/APU-PPT antar negara ASEAN dan mitra lainnya menjadi kendala signifikan (Thunes, 2025 ; ANQA Compliance ; Arctic Intelligence). Undang-undang privasi data yang beragam dan kompleksitas pembagian data lintas batas juga menambah tantangan (Arctic Intelligence). Selain itu, struktur kelembagaan otoritas sistem pembayaran yang berbeda di setiap negara memerlukan pendekatan yang disesuaikan (Bank Indonesia). Tantangan harmonisasi regulasi APU-PPT untuk QRIS Lintas Batas bukan hanya bersifat teknis tetapi juga sangat politis, karena menyentuh masalah keamanan nasional dan tradisi hukum yang berbeda. Mengatasinya memerlukan upaya diplomatik yang signifikan di samping solusi teknis, membangun kepercayaan dan kemauan politik antar negara untuk bekerja sama dalam masalah penegakan hukum yang sensitif.
3. **Interoperabilitas Teknis:** Infrastruktur warisan di beberapa negara dan standar yang tidak konsisten (misalnya, untuk pesan seperti ISO 20022) dapat menghambat integrasi (Thunes, 2025; Payneteas, 2025). Meskipun adopsi global ISO 20022 meningkat, inkonsistensi dalam implementasi tetap menjadi risiko (BIS/CPMI, 2023b). Kompleksitas integrasi berbagai hubungan bilateral di bawah RPC juga akan meningkat seiring ekspansinya (AMRO, 2025) , meskipun proyek seperti Nexus dari BIS menawarkan potensi solusi multilateral (AMRO, 2025).
4. **Adopsi dan Literasi Digital:** Memastikan adopsi yang lebih luas di luar UMKM yang sudah melek digital dan mengatasi tingkat literasi digital yang rendah di beberapa segmen masyarakat menjadi penting (JISEBI, 2024). Membangun kepercayaan, terutama di kalangan populasi yang lebih tua atau kurang paham teknologi, juga krusial (AJIM, 2025).
5. **Persaingan dan Inovasi Berkelanjutan:** QRIS perlu terus kompetitif menghadapi teknologi pembayaran baru dan memastikan ekosistem PJP dan fintech di sekitarnya terus berinovasi.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

#### **Kesimpulan**

QRIS memiliki potensi multi-level yang signifikan untuk mengakselerasi transformasi Indonesia menjadi hub fintech digital di kawasan Asia Pasifik. Pencapaian utamanya hingga saat ini meliputi pemberdayaan UMKM melalui peningkatan efisiensi dan inklusi keuangan, peran fundamental dalam membangun konektivitas pembayaran regional di ASEAN, serta kontribusinya terhadap penegakan kedaulatan digital dan finansial Indonesia. Namun, untuk merealisasikan potensi penuhnya, tantangan utama terkait keamanan siber, harmonisasi regulasi lintas batas yang kompleks, interoperabilitas teknis, pemerataan adopsi melalui peningkatan literasi digital, dan pemeliharaan daya saing melalui inovasi berkelanjutan harus diatasi secara komprehensif dan strategis.

#### **Rekomendasi Kebijakan**

Untuk memaksimalkan potensi QRIS dan mengatasinya, diperlukan pendekatan yang terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan:

- **Untuk Pemerintah dan Bank Indonesia:**

1. **Perkuat Kerangka Keamanan Siber Nasional:** Menginvestasikan sumber daya dalam infrastruktur keamanan siber untuk sistem keuangan, mempromosikan kesadaran dan praktik terbaik keamanan siber di kalangan pengguna dan merchant, serta mewajibkan audit keamanan rutin bagi PJP.



2. Dorong Harmonisasi Regulasi secara Diplomatik: Memimpin secara aktif upaya di ASEAN dan dengan negara mitra lainnya untuk menyelaraskan standar KYC/APU-PPT dan kerangka perlindungan data untuk pembayaran lintas batas (FSB, 2023 ; ANQA Compliance), memanfaatkan forum seperti RPC ASEAN dan inisiatif BIS.
  3. Promosikan Literasi Digital dan Adopsi Inklusif: Mengembangkan program yang ditargetkan untuk meningkatkan literasi digital dan keuangan, terutama bagi UMKM di daerah pedesaan dan populasi yang kurang terlayani (JISEBI, 2024), guna memperluas adopsi QRIS.
  4. Bina Ekosistem Inovasi: Mendorong inovasi di atas platform QRIS dengan mendukung fintech sandbox, mempromosikan API terbuka (dengan keamanan yang terjaga), dan memastikan lingkungan yang kompetitif bagi PJP.
  5. Kembangkan Strategi Data Nasional untuk QRIS: Menetapkan pedoman yang jelas untuk penggunaan etis data yang dihasilkan QRIS guna mendukung inklusi keuangan (misalnya, penilaian kredit untuk UMKM) sambil melindungi privasi.
- **Untuk Pelaku Industri (PJP, Fintech):**
    1. Prioritaskan Pengalaman Pengguna dan Keamanan: Terus meningkatkan kegunaan dan fitur keamanan aplikasi berkemampuan QRIS.
    2. Kembangkan Layanan Bernilai Tambah: Menawarkan layanan di luar pembayaran dasar (misalnya, program loyalitas, integrasi manajemen inventaris untuk UMKM) untuk meningkatkan daya tarik QRIS.
    3. Berkolaborasi dalam Solusi Lintas Batas: Bekerja sama dengan Bank Indonesia dan mitra internasional untuk memastikan interoperabilitas teknis dan operasional yang mulus untuk QRIS Lintas Batas.
  - **Untuk Akademisi dan Peneliti:**
    1. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak ekonomi jangka panjang QRIS, efektivitas berbagai strategi adopsi, ancaman keamanan siber yang berkembang, dan implikasi sosio-ekonomi dari data pembayaran digital skala besar.
    2. Mengeksplorasi model tata kelola untuk sistem pembayaran regional dan dampaknya terhadap stabilitas dan inklusi keuangan.

Kebijakan yang efektif untuk QRIS memerlukan pendekatan "seluruh pemerintahan" (whole-of-government) dan "seluruh ekosistem" (whole-of-ecosystem). Keberhasilan QRIS bergantung pada faktor-faktor di luar teknologi pembayaran semata. Keamanan siber melibatkan kementerian komunikasi/IT dan penegak hukum; literasi digital melibatkan kementerian pendidikan dan pengembangan UMKM; harmonisasi regulasi melibatkan kementerian luar negeri dan hukum; dan adopsi industri memerlukan dukungan dan inovasi sektor swasta. Oleh karena itu, strategi terkoordinasi yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah, regulator, pelaku sektor swasta, dan akademisi sangat penting. Pembentukan gugus tugas antar-lembaga tingkat tinggi atau badan koordinasi khusus untuk pengembangan strategis ekosistem keuangan digital Indonesia, dengan QRIS sebagai pilar utama, patut dipertimbangkan.

## Implikasi untuk Standar Akuntansi

Adopsi QRIS yang meluas, terutama oleh UMKM, akan memerlukan standar akuntansi yang jelas untuk transaksi digital, pengakuan pendapatan, dan manajemen data. Hal ini berpotensi mengarah pada panduan atau standar baru untuk pelaporan keuangan digital, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat (Afrianti, Prasetyo, & Fauzi, 2025).

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., Rukmanab, L., & Wahida, W. (2022). Efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran non tunai Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam mempengaruhi inklusi keuangan mahasiswa. *Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 3(2), 73–85.



- Afrianti, A. P., Prasetyo, M., & Fauzi M. (2025). Potensi QRIS dalam transformasi Indonesia menjadi hub fintech digital di kawasan Asia Pasifik. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 5(2), 1–4.
- Agus, E. (2009). *Aplikasi statistik dengan SPSS 16.0*. Prestasi Pustaka.
- Ahdiat, A. (2023). *Pertumbuhan QRIS*. Data Boks.
- Aini, D. N. (2021). *Analisis implementasi sistem pembayaran Quick Respond Indonesia Standard (QRIS) bagi pemilik UMKM di Kecamatan Cipinang Besar Selatan* [Skripsi, Universitas tidak disebutkan].
- Ainvest. (2025, Juni). *Asia de-dollarization surge: Navigating geopolitical shifts & portfolio opportunities*. Ainvest.
- Aisyah, S., Andriani, N., Rahmadyah, N., Novriansyah, D., Putri, A., & Mayori, E. (2023). Implementasi teknologi financial dalam QRIS sebagai sistem pembayaran digital pada sektor UMKM di Kota Binjai. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 3(1), 12–18.
- Alamsyah, A. (2019). *Pengaruh penerimaan sistem pembayaran Gopay menggunakan technology acceptance-model terhadap pendapatan driver Gojek di Kota Medan* [Skripsi, Universitas tidak disebutkan].
- AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office). (2025). *Enhancing regional payment connectivity across ASEAN+3 economies*. AMRO.
- Annisa, A. (2023). *Analisis pengaruh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan risiko terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis* [Skripsi, Universitas tidak disebutkan].
- ANQA Compliance. (n.d.). *AML South East Asia region*. Diakses pada 14 Juni 2025, dari ANQA Compliance.
- Arctic Intelligence. (n.d.). *Cross-border collaboration in financial crime risk management*. Diakses pada 14 Juni 2025, dari Arctic Intelligence.
- ASEAN. (2023). *ASEAN leaders' declaration on advancing regional payment connectivity and promoting local currency transactions*. ASEAN Secretariat.
- ASPI. (2022, 28 Desember). *Penyusunan materi edukasi untuk merchant dan pengguna QRIS*. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
- Atifah, Josef, & Suci. (2020). Implementasi sistem pembayaran Quick Response Indonesia Standard bagi perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Ekonomi*.
- Azzahroo, R. A., & Estiningrum, S. D. (2021). Preferensi mahasiswa dalam menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai teknologi pembayaran. *Manajemen Motivasi*, 17, 10–17.
- Bank for International Settlements, Committee on Payments and Market Infrastructures (BIS-CPMI). (2022). *Framework for fast payment system interlinking*. CPMI Briefs.
- Bank for International Settlements, Committee on Payments and Market Infrastructures (BIS-CPMI). (2023a). *Fast payments – Enhancing the speed and availability of payments*. CPMI Briefs.
- Bank for International Settlements, Committee on Payments and Market Infrastructures (BIS-CPMI). (2023b). *Harmonising the ISO 20022 data requirements for enhancing cross-border payments – Final report*. BIS.
- Bank Indonesia. (2019). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2024). *Siaran pers dan publikasi terkait QRIS*. Bank Indonesia.
- Carliner, A. (2024, 13 Februari). *Payment systems' changing role from economic growth to the new foreign policy lever*. Brookings Institution.